

Daftar Pustaka

- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Ghara Ilmu, Yogyakarta. Asikin, Amaruddin dan Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Amaruddin dan Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arrasuli, Benny K., 2012, *Dinamila Pengaturan dan Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- I Gde Pantja Astawa, 2013, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan UUD 1945, Desertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Ismawan, Indra. 2002. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Th 2004 tentang Pemerintahan Desa*, Pondok Edukasi, Solo.
- Ismawan, Indra, 2002, *Ranjau – Ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo.
- Luwihono, 2007, *Demokrasi Desa di Era Otonomi Daerah: Studi Demokrasi Desa dan Dinamika Politiknya di Era Otonomi*, Tesis, Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaran Pemerintahan Desa*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1990, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut Marsono, 2005, Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Marsono, 2005, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, Eko Jaya, Jakarta.
- Maschab, Mushuri, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Indonesia*, PolGov, Yogyakarta.

- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Retnoningsih, Dian, 2012, *Tata Kelola Desa: Isu-Isu Otonomi Desa dan Pemberdayaan Desa (Analisis Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*, Tesis, Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi di Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- SF Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Sigit Riyanto, *et.all.*, 2013, *Keterampilan Hukum : Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunny, Ismail, 1986, *Pengeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 1994, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Thoha Miftah, 2014, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wahyuni, Nur, 2013, *Perilaku Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Kerja Birokrasi (Suatu Studi Pada Direktorat Urusan Pemerintahan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jendera Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri*, Tesis, Pasca sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199).

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri, “Data Wilayah”,

<http://www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah> diakses pada 14 September 2015 pukul 14.00 WIB.

Yulianto, ”Menteri Desa Mengapresiasi Masukan Ire”,

<http://www.ireyogya.org/id/news/menteri-desa-mengapresiasi-masukan-ire.html>, diakses 13 Maret 2015.

Kementerian Dalam Negeri, “Profil Ditjen dalam Kementerian Dalam Negeri”,

<http://pmd.kemendagri.go.id/profil/sekilas-ditjen-pmd> diakses 26 Februari 2014